

MODEL *COMMUNITY-BASED TOURISM* DALAM PENGELOLAAN WISATA RELIGI: STUDI PARTISIPASI UMAT HINDU DI PURA AGUNG GIRI NATHA SEMARANG

Lahai Roi ¹, Aurilia Triani Aryaningtyas ²
Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Pariwisata Indonesia
lahairoi.21530008@student.stiepari.ac.id ¹
auriliatriani@stiepari.ac.id ²

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji implementasi *Community-Based Tourism (CBT)* dalam pengelolaan destinasi wisata religi di Pura Agung Giri Natha Semarang, menganalisis pola partisipasi umat Hindu, implementasi prinsip-prinsip *CBT*, serta faktor pendukung dan penghambat partisipasi komunitas. Menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus tunggal, data dikumpulkan melalui wawancara mendalam semi-terstruktur terhadap 5 informan dari lima kelompok: pengurus pura, tokoh adat Hindu, pelaku UMKM, ahli pariwisata, dan wisatawan. Analisis data menggunakan model interaktif Miles, Huberman, dan Saldana (2014) dengan tiga siklus koding yang menghasilkan 5 tema utama. Hasil penelitian menunjukkan bahwa partisipasi umat Hindu berlangsung dalam tiga dimensi deliberatif, operasional, dan evaluatif yang berlandaskan filosofi ngayah dan Tri Hita Karana. Sistem Tri Mandala terbukti efektif memediasi tegangan antara fungsi sakral dan wisata. Harmoni lintas agama yang organik menjadi keunggulan komparatif destinasi yang sulit direplikasi. Hambatan utama adalah ketiadaan sistem pencatatan kunjungan, keterbatasan infrastruktur, dan kapasitas SDM digital. Penelitian ini berkontribusi pada pengembangan.

Keywords: *Community-Based Tourism*, wisata religi, partisipasi komunitas, Tri Hita Karana, Pura Agung Giri Natha

PENDAHULUAN

Sektor pariwisata merupakan salah satu pilar pembangunan ekonomi yang terus mengalami pertumbuhan signifikan di Indonesia. Dalam kerangka pembangunan pariwisata yang berkelanjutan, paradigma *Community-Based Tourism (CBT)* atau pariwisata berbasis komunitas mendapatkan

perhatian yang semakin besar dari akademisi, praktisi, maupun pembuat kebijakan. *CBT* menempatkan masyarakat lokal sebagai subjek utama, bukan sekadar objek atau penonton dari aktivitas kepariwisataan (Krittayaruangroj et al., 2023). Prinsip inti *CBT* adalah memastikan bahwa masyarakat lokal memiliki kendali atas sumber daya alam

dan budaya yang menjadi daya tarik wisata, serta memperoleh manfaat ekonomi, sosial, dan budaya yang adil dan merata (Giampiccoli & Mtapuri, 2012).

Pengembangan pariwisata berbasis komunitas di Indonesia semakin relevan, mengingat kekayaan warisan budaya dan spiritual yang tersebar di seluruh kepulauan nusantara. Salah satu segmen yang menunjukkan pertumbuhan pesat adalah wisata religi, yakni aktivitas perjalanan wisata yang didorong oleh motivasi spiritual, keagamaan, atau pencarian makna transenden di situs-situs keagamaan (Battour & Ismail, 2016). Potensi wisata religi Indonesia sangat besar, mulai dari masjid-masjid bersejarah, gereja kuno, candi-candi Hindu-Buddha, hingga pura-pura yang tersebar di berbagai wilayah. Dalam konteks global, wisata religi telah berkembang menjadi salah satu segmen pasar pariwisata terbesar dengan nilai transaksi yang terus meningkat (Rasoolimanesh et al., 2022)

Agama Hindu sebagai salah satu agama yang diakui di Indonesia memiliki tradisi dan tempat ibadah yang kaya nilai budaya. Pura, sebagai tempat pemujaan umat Hindu, tidak hanya berfungsi sebagai ruang sakral untuk menjalankan ritual keagamaan, tetapi juga sebagai representasi dari sistem kosmologi, seni, dan arsitektur tradisional

Hindu yang bernilai tinggi sebagai daya tarik wisata (Wilantari, 2018).

Pura Agung Giri Natha yang terletak di Kota Semarang, Jawa Tengah, merupakan salah satu pura terbesar di Jawa yang dalam beberapa tahun terakhir semakin banyak dikunjungi oleh wisatawan dari berbagai latar belakang agama dan budaya. Keberadaan pura ini di tengah kota metropolitan yang heterogen menambah dimensi menarik tersendiri dalam kajian pariwisata religi berbasis komunitas.

Pengembangan destinasi wisata religi di pura menghadapi tantangan yang kompleks dan berlapis. Pertama, terdapat tegangan inheren antara fungsi sakral pura sebagai tempat ibadah dengan fungsi publiknya sebagai destinasi wisata yang terbuka bagi siapa saja. Kedua, komunitas umat Hindu sebagai pemilik dan pengelola pura sering kali tidak memiliki kapasitas kelembagaan yang memadai untuk mengelola arus wisatawan sekaligus menjaga kelestarian nilai-nilai keagamaan. Ketiga, model-model pengembangan pariwisata yang diterapkan pemerintah daerah kadang kala tidak selaras dengan aspirasi dan nilai-nilai komunitas Hindu lokal (Revianur, 2020). Kondisi ini menuntut pendekatan pengelolaan yang tidak hanya berorientasi pada pertumbuhan ekonomi, tetapi juga pada

pelestarian budaya dan pemberdayaan komunitas.

Dalam perspektif akademik, *Community-Based Tourism* berkembang sebagai alternatif terhadap model pariwisata massal yang sering dikaitkan dengan degradasi lingkungan, marginalisasi masyarakat lokal, serta hilangnya identitas budaya. Giampiccoli & Mtapuri (2012) menjelaskan bahwa *CBT* menempatkan masyarakat sebagai pemilik sekaligus pengelola sumber daya wisata sehingga manfaat ekonomi, sosial, dan budaya dapat dinikmati secara lebih adil oleh komunitas lokal. Perkembangan kajian terbaru menunjukkan bahwa keberhasilan *CBT* tidak lagi diukur hanya dari tingkat keterlibatan masyarakat, tetapi juga dari sejauh mana komunitas memiliki kewenangan nyata dalam proses pengambilan keputusan, pengelolaan sumber daya, dan distribusi manfaat pembangunan pariwisata (Krittayaruangroj et al., 2023; Kunjuran, 2022). Selain itu, nilai-nilai budaya dan keagamaan semakin dipandang sebagai modal sosial yang mampu memperkuat kohesi komunitas serta meningkatkan keberlanjutan pengelolaan destinasi wisata (Adhitama, 2023).

Dalam konteks wisata religi, partisipasi masyarakat memiliki karakteristik yang berbeda dibandingkan dengan destinasi

wisata umum. Battour & Ismail (2016) menjelaskan bahwa wisata religi tidak hanya berorientasi pada aktivitas perjalanan, tetapi juga pada pengalaman spiritual, penguatan identitas keagamaan, serta hubungan emosional antara pengunjung dan komunitas lokal. Oleh karena itu, keberhasilan pengelolaan wisata religi sangat dipengaruhi oleh kemampuan komunitas dalam menjaga keseimbangan antara fungsi sakral sebagai tempat ibadah dengan fungsi publik sebagai destinasi wisata. Ruru et al. (2022) menunjukkan bahwa tingkat partisipasi masyarakat akan meningkat apabila pengembangan pariwisata tidak dipersepsikan mengancam integritas spiritual situs keagamaan.

Dalam tradisi Hindu, filosofi Tri Hita Karana yang menekankan keharmonisan hubungan manusia dengan Tuhan (parahyangan), sesama manusia (pawongan), dan lingkungan (palemahan) menjadi landasan etis dalam pembangunan yang berkelanjutan (Wilantari, 2018). Di sisi lain, konsep Tri Mandala mengatur pembagian ruang berdasarkan tingkat kesakralan sehingga aktivitas wisata tetap dapat berlangsung tanpa mengganggu fungsi utama pura sebagai tempat ibadah Kartika (2019). Integrasi kedua konsep tersebut memberikan perspektif yang relevan dalam memahami

implementasi prinsip-prinsip *CBT* pada destinasi wisata religi berbasis komunitas.

Berdasarkan landasan teoritis tersebut, penelitian ini menggunakan *Community-Based Tourism* sebagai kerangka utama untuk menganalisis partisipasi komunitas dalam pengelolaan wisata religi di Pura Agung Giri Natha. Kerangka tersebut diperkaya oleh filosofi Tri Hita Karana sebagai sistem nilai masyarakat Hindu dan konsep Tri Mandala sebagai mekanisme pengelolaan ruang sakral. Ketiga konsep tersebut menjadi dasar dalam menganalisis bentuk partisipasi komunitas, implementasi prinsip-prinsip *CBT*, serta keseimbangan antara fungsi religius dan fungsi wisata sebagaimana ditunjukkan pada Gambar 1.



Gambar 1. *Conceptual Framework*: Integrasi Tri Hita Karana, Tri Mandala, dan Partisipasi *CBT*

Meskipun penelitian mengenai *Community-Based Tourism* telah

berkembang cukup pesat, sebagian besar studi masih berfokus pada desa wisata, kawasan pesisir, maupun destinasi berbasis ekowisata (Demkova et al., 2022; Giampiccoli & Mtapuri, 2012). Kajian mengenai implementasi *CBT* pada destinasi wisata religi berbasis agama Hindu di kawasan perkotaan masih relatif terbatas. Selain itu, penelitian sebelumnya umumnya membahas partisipasi masyarakat atau keberlanjutan destinasi secara terpisah tanpa mengintegrasikan prinsip-prinsip *CBT* dengan nilai lokal seperti Tri Hita Karana dan sistem Tri Mandala dalam satu kerangka analisis (Revianur, 2020; Wilantari, 2018).

Berangkat dari kesenjangan tersebut, penelitian ini menawarkan kebaruan dengan menganalisis bagaimana prinsip-prinsip *Community-Based Tourism* diimplementasikan melalui nilai-nilai lokal Hindu dalam pengelolaan wisata religi di kawasan perkotaan yang multikultural. Penelitian ini tidak hanya mengidentifikasi bentuk partisipasi masyarakat, tetapi juga menjelaskan bagaimana filosofi Tri Hita Karana dan sistem Tri Mandala berfungsi sebagai mekanisme sosial-budaya yang menjaga keseimbangan antara kepentingan pelestarian kesakralan pura dengan pengembangan aktivitas pariwisata. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memperkaya literatur mengenai *CBT* pada

destinasi wisata religi sekaligus memberikan rekomendasi praktis bagi pengelolaan wisata berbasis komunitas yang berkelanjutan.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan untuk: (1) menganalisis bentuk dan pola partisipasi umat Hindu dalam pengelolaan wisata religi di Pura Agung Giri Natha Semarang; (2) menganalisis implementasi prinsip-prinsip *Community-Based Tourism* dalam konteks wisata religi Hindu di kawasan perkotaan; serta (3) mengidentifikasi faktor-faktor yang mendukung dan menghambat partisipasi komunitas dalam pengembangan wisata religi berbasis masyarakat.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus tunggal (*single holistic case study*). Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian ini bertujuan memahami secara mendalam, holistik, dan kontekstual fenomena partisipasi komunitas Hindu dalam pengelolaan wisata religi yang tidak dapat direduksi ke dalam variabel terukur (Creswell & Creswell, 2018). Studi kasus dipilih karena penelitian ini berupaya menjawab pertanyaan "bagaimana" dan "mengapa" suatu fenomena berlangsung dalam konteks kehidupan nyata (Patnaik & Pandey, 2019)

Penelitian dilaksanakan di Pura Agung Giri Natha, Jalan Perintis Kemerdekaan, Kelurahan Bendungan, Kecamatan Gajahmungkur, Kota Semarang, Jawa Tengah, pada bulan maret tahun 2026. Lokasi ini dipilih karena merupakan satu-satunya pura Hindu terbesar di Jawa Tengah yang telah ditetapkan sebagai destinasi wisata religi resmi oleh Pemerintah Kota Semarang sejak tahun 2022, sekaligus memiliki keunikan akulturasi budaya Bali-Jawa yang belum dikaji dari perspektif *CBT*.

Informan penelitian ditentukan secara purposif berdasarkan relevansi peran, kedalaman pengetahuan, dan keterlibatan langsung dalam pengelolaan atau pemanfaatan wisata religi di pura (Creswell & Creswell, 2018). Penentuan kecukupan data mengacu pada prinsip saturasi teoritis (Hennink & Kaiser, 2022). Penelitian melibatkan 5 informan dari lima kelompok sebagaimana tersaji pada Tabel 1.

Tabel 1. Profil Informan Penelitian

INF-	NAMA	JABATAN
01	I Gusti Ketut Susila	Pengelola Utama Pura Agung Giri Natha
02	I Nengah Wirta Darmayana	Tokoh Hindu
03	Sunardi	Pengelola Kebersihan & Keamanan Pura
04	Nina Mistriani, SE., M.MPar	Ahli Pariwisata

05	Isnu Hadi Sunarko	Wisatawan
----	-------------------	-----------

Pengumpulan data dilakukan melalui tiga teknik. Pertama, wawancara mendalam semi-terstruktur dengan panduan yang mencakup tiga tema seragam untuk seluruh informan: (T1) pola dan bentuk partisipasi komunitas; (T2) implementasi prinsip *CBT*; dan (T3) faktor pendukung dan penghambat partisipasi. Pertanyaan disesuaikan dengan kompetensi masing-masing informan. Kedua, observasi partisipatif selama periode penelitian di berbagai kegiatan pura. Ketiga, studi dokumentasi terhadap arsip dan dokumen pengelolaan pura.

Analisis data menggunakan model analisis interaktif Miles, Huberman, dan Saldana (2014) yang terdiri atas kondensasi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Kondensasi data dilakukan melalui tiga siklus koding (Saldaña, 2021). Trustworthiness data dijamin melalui triangulasi sumber dan teknik, serta member checking di mana ringkasan temuan dikembalikan kepada informan kunci untuk dikonfirmasi (Creswell & Creswell, 2018; Hennink & Kaiser, 2022).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Temuan

Gambaran Umum Pura Agung Giri Natha sebagai Destinasi Wisata Religi

Pura Agung Giri Natha merupakan pura Hindu terbesar di Jawa Tengah yang berlokasi pada ketinggian 151 meter di atas permukaan laut di Kelurahan Bendungan, Kecamatan Gajahmungkur, Kota Semarang. Posisi geografis ini memberikan pemandangan panoramik Kota Semarang yang menjadi daya tarik tersendiri bagi wisatawan, terutama saat momen-momen khusus seperti perayaan Tahun Baru. Pemerintah Kota Semarang secara resmi menetapkan Pura Agung Giri Natha sebagai destinasi wisata religi pada tahun 2022.

Dari sisi arsitektur, pura ini menampilkan perpaduan khas budaya Bali dan Jawa yang unik: gapura bergaya candi Jawa dihiasi ornamen dan ukiran khas Bali, pendopo bergaya Jawa di sisi kiri kompleks yang dilengkapi gamelan, serta Patung Ganesha di gerbang utama sebagai representasi pengaruh budaya India. Pengelola utama, I Gusti Ketut Susila, menjelaskan filosofi di balik perpaduan arsitektur tersebut:

"Pura ini sengaja dirancang dengan memadukan unsur arsitektur Bali dan Jawa. Bisa kita lihat dari bentuk gapura yang

mengadopsi gaya candi Jawa, namun ornamen dan ukiran-ukirannya khas Bali. Ini mencerminkan harmonisasi dua budaya yang sudah lama terjalin." (I Gusti Ketut Susila, Pengelola Utama Pura)

Sistem tata ruang pura menerapkan konsep Tri Mandala: Nista Mandala (area umum untuk parkir dan kuliner), Madya Mandala (area sosial-budaya), dan Utama Mandala (area paling sakral untuk ritual keagamaan). Sistem ini tidak hanya merupakan tata ruang fisik, tetapi juga mekanisme sosio-spiritual yang mengatur interaksi antara wisatawan dan komunitas Hindu.

Penelitian ini menemukan bahwa pengelola pura belum memiliki sistem pencatatan kunjungan wisatawan secara terstruktur dan real-time. I Gusti Ketut Susila mengakui kondisi ini secara terbuka:

"Kami tidak punya petugas khusus di pintu masuk yang mencatat setiap pengunjung. Tidak ada loket, tidak ada tiket. Kalau ada data yang bagus, kami lebih mudah minta dukungan pemerintah dan merencanakan pengembangan." (I Gusti Ketut Susila, Pengelola Utama Pura)

Kondisi ini dikonfirmasi secara akademis oleh Nina Mistriani yang mengidentifikasi ketiadaan data sebagai hambatan sistemik terbesar bagi pengembangan *CBT* di pura.

Bentuk dan Pola Partisipasi Umat Hindu dalam Pengelolaan Wisata Religi

Analisis data mengidentifikasi tiga dimensi utama partisipasi komunitas Hindu yang berlangsung secara terintegrasi. Tabel 2 merangkum matriks bentuk dan pola partisipasi tersebut.

Tabel 2. Matriks Bentuk dan Pola Partisipasi Komunitas Hindu dalam Pengelolaan Wisata Religi Pura Agung Giri Natha.

No.	Dimensi	Bentuk Keterlibatan	Aktor Utama
1	Deliberatif (Perencanaan)	Rapat Kerja Tahunan lintas sekaa, musyawarah agenda wisata, penetapan tata tertib Tri Mandala, negosiasi batas sakral-wisata (85/15)	Pengurus pura, pemangku adat
2	Operasional Langsung (ngayah)	Pemanduan wisata informal, pemeliharaan Tri Mandala, pertunjukan seni budaya Hindu, workshop banten, penjagaan tata tertib wisatawan	Pengurus Pura, Petugas Pura, Komunitas Hindu
3	Operasional Tidak Langsung (Ekonomi)	UMKM kuliner dan kerajinan, sistem	Pelaku UMKM komunitas

		voucher saat event besar, jasa keamanan dan kebersihan lintas agama	sekitar pura
4	Evaluatif (Pengawasan)	Forum musyawarah bulanan terbuka, evaluasi tata tertib Tri Mandala, penyampaian aspirasi komunitas lintas agama	Seluruh komponen komunitas, termasuk non-Hindu

Sumber: Data Primer Penelitian, 2026

Dimensi deliberatif berlangsung melalui Rapat Kerja Tahunan yang mengintegrasikan agenda keagamaan dengan perencanaan wisata. I Nengah Wirta Darmayana menggambarkan logika musyawarah ini dari perspektif kelembagaan Hindu:

"Di Komunitas Hindu Kota Semarang, kami selalu menekankan bahwa wisata di pura bukan sekadar urusan ekonomi. Ini urusan dharma kewajiban kita untuk memperkenalkan ajaran dan budaya Hindu kepada dunia dengan cara yang benar dan bermartabat. Musyawarah perencanaan wisata adalah musyawarah dharma, bukan musyawarah bisnis." (I Nengah Wirta Darmayana, Tokoh Hindu)

I Gusti Ketut Susila, melengkapi gambaran ini dengan mendeskripsikan

bagaimana ketegangan antargenerasi dikelola secara produktif dalam forum musyawarah: ketika kelompok senior ingin menjaga kemurnian tradisi dan kelompok muda ingin lebih terbuka terhadap inovasi wisata, forum musyawarah menjadi arena negosiasi yang menghasilkan keputusan kolektif yang dipegang bersama.

Dimensi operasional yang paling menonjol adalah peran Sunardi sebagai "pintu pertama" bagi wisatawan. Sebagai warga Jawa Muslim yang telah bekerja di pura lebih dari dua dekade, Sunardi memiliki aksesibilitas komunikatif yang unik lintas budaya dan lintas agama yang tidak dimiliki oleh pengurus Hindu:

"Banyak wisatawan yang justru lebih nyaman tanya ke saya daripada ke pengurus. Saya ceritakan apa yang saya tahu, sudah 20 tahun di sini jadi hafal semua. Arsitektur pura, makna patung-patungnya, sejarahnya. Kalau ada yang bertanya soal agama Hindu lebih dalam, baru saya arahkan ke pemangku." (Sunardi, Pengelola Kebersihan & Keamanan)

Implementasi Prinsip-Prinsip CBT: Pencapaian dan Kesenjangan

Implementasi CBT di Pura Agung Giri Natha menunjukkan profil yang tidak merata di antara tiga prinsip utama. Tabel 3 menyajikan penilaian tingkat implementasi

ketiga prinsip *CBT* berdasarkan triangulasi data dari lima informan.

Tabel 3. Tingkat Implementasi Prinsip *CBT* di Pura Agung Giri Natha

Prinsip <i>CBT</i>	Bukti Lapangan	Sumber Konfirmasi
Kepemilikan Komunitas (<i>Community Ownership</i>)	Penolakan atas tawaran paket wisata komersial dari agen luar; semua keputusan wisata melalui musyawarah komunitas; pengurus pura adalah anggota komunitas Hindu sendiri	INF-01, INF-02, INF-04
Integritas Budaya (<i>Cultural Integrity</i>)	Kesepakatan komunal 85% kemurnian ritual Bali; 15% adaptasi kontekstual Jawa melalui musyawarah; autentisitas dikonfirmasi wisatawan; tidak ada modifikasi ritual demi selera turis	INF-01, INF-02, INF-04, INF-05
Distribusi Manfaat (<i>Equitable Benefit</i>)	Pedagang posisi strategis lebih diuntungkan; tidak ada sistem tiket; pemasukan pura hanya dari punia sukarela; belum ada mekanisme distribusi yang terstruktur dan transparan	INF-01, INF-03, INF-04

Sumber: Data Primer, 2026

I Nengah Wirta Darmayana memberikan penjelasan mendalam tentang mengapa kepemilikan komunitas terpelihara

dengan sangat kuat di pura ini, yakni melalui mekanisme pengambilan keputusan yang berakar pada tradisi musyawarah Hindu:

"Dalam pandangan Hindu, komunitas bukan sekadar kumpulan individu. Komunitas adalah sekaa jaringan fungsional yang masing-masing punya tanggung jawab spesifik tapi terhubung oleh tujuan yang sama: menjaga kesucian pura dan keberlangsungan dharma. Ketika wisata masuk ke dalam sistem ini, ia harus mengikuti logika sekaa, bukan logika pasar." (I Nengah Wirta Darmayana, Tokoh Hindu)

Nina Mistriani mengkonfirmasi secara akademis bahwa mekanisme 85/15 merupakan contoh negosiasi budaya deliberatif yang luar biasa dari perspektif *CBT*: integritas budaya yang tinggi tidak dicapai melalui isolasi, melainkan melalui adaptasi kontekstual yang selektif dan disepakati bersama.

Sementara itu, distribusi manfaat yang merata merupakan titik terlemah yang diidentifikasi dari perspektif yang beragam. Sunardi mengungkapkan ketimpangan yang dirasakan langsung oleh pelaku UMKM kecil, sementara Isnu Hadi Sunarko sebagai wisatawan mengamati bahwa vitalitas ekonomi di sekitar pura terlihat nyata namun distribusinya tampak tidak merata.

Faktor Pendukung Partisipasi Komunitas

Penelitian mengidentifikasi lima faktor pendukung yang saling berinteraksi dan memperkuat satu sama lain dalam mendorong partisipasi komunitas di Pura Agung Giri Natha.

Faktor pertama dan paling fundamental adalah motivasi spiritual berbasis ngayah. I Nengah Wirta Darmayana mendefinisikan ngayah dalam konteks *CBT* dengan sangat tajam:

"Ngayah adalah konsep yang tidak ada padanannya dalam literatur *CBT* konvensional. Ini bukan sekadar voluntarisme ini adalah yadnya, persembahan kepada Tuhan melalui pelayanan kepada manusia dan lingkungan. Ketika partisipasi dilandasi ngayah, ia tidak bisa dihentikan oleh perubahan ekonomi atau politik, karena motivasinya bukan dari luar melainkan dari keyakinan paling dalam." (I Nengah Wirta Darmayana, Tokoh Hindu)

Faktor kedua adalah harmoni lintas agama yang organik. Sunardi, seorang Muslim yang telah bekerja di pura Hindu selama lebih dari dua dekade merupakan representasi paling nyata dari modal sosial lintas agama yang telah berkembang secara organik, bukan karena program toleransi yang dipaksakan. Fakta bahwa Kelurahan Bendungan meraih predikat "Kampung Pancasila" merupakan pengakuan formal dari

realitas kehidupan sehari-hari yang telah ada jauh sebelum predikat tersebut diberikan.

Faktor ketiga adalah Tri Hita Karana sebagai sistem nilai yang holistik. I Nengah Wirta Darmayana menegaskan bahwa Tri Hita Karana bukan sekadar konsep filosofis yang diajarkan dalam kitab suci, melainkan panduan operasional yang hidup dalam setiap keputusan pengelolaan pura, termasuk keputusan tentang wisata. Ini memberikan pura sebuah "konstitusi nilai" yang jelas dan dipegang bersama oleh seluruh komunitas.

Faktor keempat adalah identitas diaspora Bali di Semarang yang menciptakan motivasi tambahan. Nina Mistriani mengidentifikasi faktor ini sebagai keunikan kontekstual Pura Agung Giri Natha: sebagai minoritas di kota yang didominasi budaya Jawa, komunitas Bali menjadikan pura sebagai titik konsolidasi identitas, sehingga partisipasi dalam pengelolaan pura sekaligus merupakan ekspresi identitas budaya yang bermartabat.

Faktor kelima adalah dukungan kelembagaan Pemerintah Kota Semarang, terutama melalui penetapan resmi pura sebagai destinasi wisata religi pada tahun 2022, yang memberikan legitimasi kebijakan bagi upaya pengembangan wisata komunitas.

Faktor Penghambat Partisipasi
Komunitas

Penelitian mengidentifikasi empat hambatan utama yang membentuk kluster hambatan sistemik. Tabel 4 merangkum temuan terkait faktor penghambat beserta sumber konfirmasi dan rekomendasi solusi.

Tabel 4. Faktor Penghambat Partisipasi *CBT* dan Rekomendasi Intervensi

Hambatan	Deskripsi & Dampak	Rekomendasi Intervensi
Infrastruktur Parkir & Akses	Jalan sempit, bus wisata tidak dapat masuk; kemacetan parah saat event besar; membatasi kapasitas kunjungan dan kualitas pengalaman wisatawan	Koordinasi Pemkot untuk kantong parkir komunal + shuttle; redesain alur akses kendaraan
Ketiadaan Sistem Pencatatan Kunjungan	Tidak ada data kunjungan real-time; melemahkan advokasi kebijakan; menghambat perencanaan kapasitas; distribusi manfaat tidak terukur	Sistem pencatatan digital non-tiket (QR code sukarela, counter elektronik) yang kompatibel dengan nilai ngayah dan punia
Keterbatasan Kapasitas SDM Digital	Terbatasnya kemampuan bahasa asing dan literasi digital; promosi wisata masih konvensional; pengelolaan media sosial tidak konsisten	Program capacity building terstruktur: pelatihan bahasa, pemanduan wisata, dan manajemen media sosial untuk anggota komunitas aktif

Risiko Komersialisasi Ritual	Tekanan untuk memodifikasi upacara demi selera pasar wisata; risiko kehilangan sakralitas jangka panjang seiring meningkatnya kunjungan	Mekanisme perlindungan ritual melalui dokumentasi formal kesepakatan 85/15; pendidikan nilai kepada generasi muda komunitas
------------------------------	---	---

Sumber: Data Primer, 2026

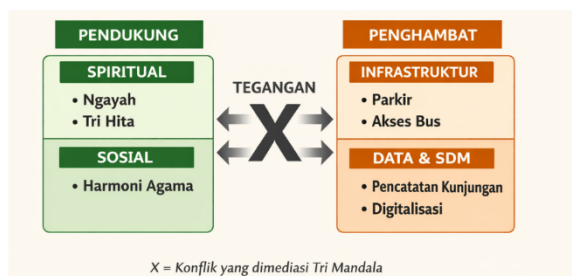
I Nengah Wirta Darmayana mengidentifikasi risiko komersialisasi ritual sebagai hambatan yang paling mengancam dalam jangka panjang jauh lebih berbahaya dari hambatan infrastruktur yang bersifat fisik:

"Yang paling saya khawatirkan bukan soal parkir atau teknologi. Itu bisa diperbaiki dengan uang dan waktu. Yang saya khawatirkan adalah ketika suatu hari komunitas kita mulai menyesuaikan upacara dengan keinginan wisatawan mempersingkat, mengurangi, memodifikasi demi kenyamanan tamu. Ketika itu terjadi, kita tidak lagi punya pura, kita punya atraksi." (I Nengah Wirta Darmayana, Tokoh Hindu)

Isnu Hadi Sunarko sebagai wisatawan memberikan perspektif *demand-side* yang penting: justru autentisitas ritual yang tidak dimodifikasi itulah yang menjadi daya tarik utama pura bagi wisatawan yang sophisticated bukan kemasan yang dipoles

untuk turis. Paradoks ini mengandung implikasi penting: menjaga integritas ritual adalah sekaligus strategi terbaik untuk mempertahankan daya saing wisata.

Berdasarkan temuan penelitian, dikembangkan Model Analisis *CBT* (Gambar 2) yang merepresentasikan factor pendukung dan penghambat wisata religi di Pura Agung Giri Natha.



Gambar 2. Matriks Faktor Pendukung dan Penghambat Partisipasi *CBT*

Pembahasan

Temuan penelitian ini mendialogkan secara kritis dengan teori *CBT* yang ada dan menghasilkan beberapa proposisi teoritis yang memperkaya pemahaman tentang *CBT* dalam konteks wisata religi perkotaan berbasis komunitas agama.

Pertama, penelitian ini memperkuat dan sekaligus melampaui kerangka *CBT* Krittayaruangroj et al. (2023) dengan membuktikan bahwa motivasi berbasis nilai spiritual (ngayah) menghasilkan partisipasi yang lebih stabil dan berkelanjutan

dibandingkan partisipasi yang dimotivasi oleh insentif ekonomi semata. Berbeda dari asumsi implisit dalam sebagian besar literatur *CBT* yang menempatkan manfaat ekonomi sebagai pendorong utama, temuan ini menunjukkan bahwa dalam komunitas agama yang kuat, partisipasi justru meningkat seiring bertambahnya waktu luang anggota komunitas sebagaimana terlihat pada anggota aktif pasca-pensiun. Temuan ini mengkonfirmasi argumen Palimbunga (2018) tentang perlunya kajian *CBT* yang lebih kontekstual dan peka terhadap dimensi nilai lokal.

Kedua, penelitian ini memberikan bukti empiris yang kuat bahwa sistem Tri Mandala merupakan inovasi lokal yang sangat efektif dalam menyelesaikan salah satu tantangan paling fundamental dalam wisata religi: mediasi tekanan antara fungsi sakral dan fungsi publik (Battour & Ismail, 2016; Ruru et al., 2022). Yang membedakan efektivitas Tri Mandala dari mekanisme zonasi yang ada di banyak destinasi wisata religi lain adalah legitimasi sosial-spiritualnya, sistem ini diterima bukan karena ada sanksi hukum, melainkan karena tertanam dalam sistem nilai komunitas yang sudah berakar selama berabad-abad. Hal ini sejalan dengan temuan Wilantari (2018) tentang efektivitas mekanisme adat Hindu dalam negosiasi ruang sakral-wisata.

Ketiga, harmoni lintas agama yang organik di Pura Agung Giri Natha merepresentasikan dimensi *CBT* yang hampir tidak pernah dibahas dalam literatur mainstream, yakni bagaimana komunitas non-anggota (warga non-Hindu) dapat menjadi bagian integral dari ekosistem *CBT* tanpa mengancam integritas komunitas inti (Demkova et al., 2022). Inklusivitas ini, yang terwujud secara konkret dalam peran Sunardi dan pelaku UMKM lintas agama, selaras dengan dimensi pawongan dalam Tri Hita Karana (Wilantari, 2018) dan membuktikan bahwa nilai-nilai lokal Hindu dapat berfungsi sebagai "modal budaya" untuk pembangunan kohesi sosial yang melampaui batas-batas keagamaan (Adhitama, 2023).

Keempat, ketiadaan sistem pencatatan kunjungan wisatawan di pura ini yang diakui oleh semua pihak sebagai hambatan namun belum juga diatasi mengungkapkan sebuah paradoks yang menarik secara teoritis: komunitas yang paling kuat dari sisi kepemilikan dan integritas budaya justru yang paling lemah dalam kapasitas manajemen informasi. Paradoks ini tidak dapat dijelaskan semata-mata sebagai kegagalan teknis; ia merupakan manifestasi dari orientasi nilai komunitas yang mengutamakan kualitas spiritual atas kuantifikasi materialistik. Pemahaman ini memiliki implikasi penting bagi desain

intervensi *capacity building*: solusi yang paling tepat bukanlah yang paling canggih secara teknologi, melainkan yang paling selaras dengan nilai-nilai komunitas (Lasally et al., 2021; Palimbunga, 2018).

Kelima, penelitian ini secara keseluruhan menegaskan bahwa model *CBT* untuk destinasi wisata religi perkotaan berbasis komunitas agama memerlukan kerangka analitis yang berbeda dari *CBT* perdesaan atau pesisir yang mendominasi literatur (Demkova et al., 2022; Fitriani & Sunardi, 2020; Lasally et al., 2021). Dimensi identitas diaspora, intensitas nilai keagamaan, dan kompleksitas mediasi sakral-wisata dalam konteks perkotaan multikultural adalah variabel-variabel yang tidak cukup terartikulasi dalam kerangka *CBT* yang ada.

PENUTUP

Penelitian ini menyimpulkan bahwa implementasi *Community-Based Tourism* di Pura Agung Giri Natha Semarang berlangsung melalui tiga dimensi partisipasi komunitas yang saling berkaitan: deliberatif melalui musyawarah sekaa tahunan, operasional berbasis ngayah, dan evaluatif melalui forum bulanan. Ketiga dimensi ini terjalin dalam sistem tata kelola komunitas Hindu yang berlandaskan Tri Hita Karana dan terwujud secara spasial melalui

penerapan Tri Mandala sebuah inovasi lokal yang efektif dalam memediasi tegangan fundamental antara fungsi sakral dan fungsi wisata.

Temuan penelitian ini menghasilkan lima proposisi teoritis yang berkontribusi pada pengembangan literatur *CBT*: (P1) ngayah lebih efektif dari insentif ekonomi sebagai basis partisipasi *CBT* dalam komunitas agama; (P2) Tri Mandala merupakan model inovasi lokal yang dapat diadaptasi untuk pengelolaan wisata religi di berbagai konteks; (P3) modal sosial lintas agama yang organik merupakan keunggulan komparatif *CBT* yang belum cukup tematisasi dalam literatur; (P4) ketiadaan sistem pencatatan kunjungan merupakan hambatan sistemik yang berdimensi nilai, bukan sekadar teknis; dan (P5) *CBT* perkotaan berbasis komunitas agama memerlukan kerangka analitis yang berbeda dari *CBT* perdesaan atau pesisir.

Untuk pengembangan penelitian selanjutnya, disarankan tiga agenda riset: (1) kajian komparatif antara Pura Agung Giri Natha dengan destinasi wisata religi Hindu di luar Bali untuk menguji transferabilitas Model *CBT* berbasis Tri Hita Karana; (2) penelitian tindakan partisipatif (participatory action research) untuk merancang sistem pencatatan kunjungan yang kompatibel dengan nilai ngayah dan punya komunitas

Hindu; dan (3) penelitian longitudinal untuk mengukur dampak jangka panjang pengembangan wisata terhadap kohesivitas komunitas, kelestarian nilai-nilai budaya, dan distribusi manfaat ekonomi yang berkeadilan.

DAFTAR PUSTAKA

- Adhitama, S. (2023). Analisis Keharmonisan Antara Agama Hindu Dan Buddha Pada Candi Jawi. *Jurnal Penelitian Agama Hindu*, 7(3), 330–345. <https://doi.org/10.37329/jpah.v7i3.2461>
- Battour, M., & Ismail, M. N. (2016). Halal tourism: Concepts, practises, challenges and future. *Tourism Management Perspectives*, 19, 150–154. <https://doi.org/10.1016/j.tmp.2015.12.008>
- Creswell, J. W., & Creswell, J. D. (2018). Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches (5th ed.). *SAGE Publications*.
- Demkova, M., Sharma, S., Mishra, P. K., Dahal, D. R., Pachura, A., Herman, G. V., Kostilnikova, K., Kolesárová, J., & Matlovicova, K. (2022). Potential for Sustainable Development of Rural Communities By Community-Based Ecotourism a Case Study of Rural Village Pastanga, Sikkim Himalaya, India. In *Geojournal of Tourism and Geosites* (Vol. 43, Number 3, pp. 964–975). gtg.webhost.uoradea.ro. <https://doi.org/10.30892/gtg.43316-910>
- Fitriani, Y., & Sunardi, S. (2020). Strategi Pengembangan Ekowisata Pantai Berbasis

- Masyarakat. *Jurnal Kepariwisataaan Indonesia*, 14(1), 12–23. <https://doi.org/10.24843/JUMPA.2020.v14.i01.p02>
- Giampiccoli, A., & Mtapuri, O. (2012). Community-Based Tourism: An Exploration of the Concept(s) from a Political Perspective. *Tourism Review International*, 16(1), 29–43. <https://doi.org/10.3727/154427212X13431568321500>
- Hennink, M., & Kaiser, B. N. (2022). Sample sizes for saturation in qualitative research: A systematic review of empirical tests. *Social Science & Medicine*, 292, 114523. <https://doi.org/10.1016/j.socscimed.2021.114523>
- Kartika, N. G. A. (2019). Hubungan Timbal Balik Antar Desa Adat dan Pariwisata. *Pariwisata Budaya: Jurnal Ilmiah Agama Dan Budaya*, 4(1), 1. <https://doi.org/10.25078/pba.v4i1.773>
- Krittayaruangroj, K., Suriyankietkaew, S., & Hallinger, P. (2023). Research on sustainability in community-based tourism: a bibliometric review and future directions. *Asia Pacific Journal of Tourism Research*, 28(9), 1031–1051. <https://doi.org/10.1080/10941665.2023.2276477>
- Kunjuraman, V. (2022). Local community participation challenges in community-based ecotourism development in Sabah, Malaysian Borneo. *Community Development Journal*, 57(3), 487–508. <https://doi.org/10.1093/cdj/bsaa065>
- Lasally, A., Khairunnisa, H., & Mahfudz, A. A. (2021). Pengembangan Desa Wisata Berbasis Komunitas Di Yogyakarta (Studi Kasus: Desa Wisata Sambu). *Al-Mustashfa: Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah*, 6(1), 34. <https://doi.org/10.24235/jm.v6i1.8021>
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldana, J. (2014). *Qualitative data analysis: A methods sourcebook* (3rd ed.). Sage Publications.
- Palimbunga, I. P. (2018). Keterlibatan masyarakat dalam pengembangan pariwisata di desa wisata Tabalansu, Papua. In *Jurnal Master Pariwisata (JUMPA)*. ojs.unud.ac.id. <https://ojs.unud.ac.id/index.php/jumpa/article/download/41004/24862>
- Patnaik, S., & Pandey, S. C. (2019). Case Study Research. In R. N. Subudhi & S. Mishra (Eds.), *Methodological Issues in Management Research: Advances, Challenges, and the Way Ahead* (pp. 163–179). Emerald Publishing Limited. <https://doi.org/10.1108/978-1-78973-973-220191011>
- Rasoolimanesh, S., Jaafar, M., & Mohamad, M. (2022). SERVQUAL Model in Tourism: Measuring Service Quality. *Journal of Travel Research*, 61(4), 789–803. <https://doi.org/https://doi.org/10.1177/0047287521992134>
- Revianur, A. (2020). Digitalisasi Cagar Budaya di Indonesia: Sudut Pandang Baru Pelestarian Cagar Budaya Masa Hindu-Buddha di Kabupaten Semarang. In *Bakti Budaya* (Vol. 3, Number 1, p. 90). scholar.archive.org. <https://doi.org/10.22146/bb.55505>

Ruru, J. M., Londa, V. Y., Palar, N. R. A., & Rompas, W. Y. (2022). Management of Religious Tourism Objects Based on Local Wisdom. *Journal La Sociale*, 3(5), 197–208. <https://doi.org/10.37899/journal-la-sociale.v3i5.722>

Saldaña, J. (2021). *The coding manual for qualitative researchers* (4th ed.). Sage Publications.

Wilantari, N. N. A. (2018). Komunikasi Massa Dalam Pariwisata Religi Hindu. *Satya Widya: Jurnal Studi Agama*, 1(2), 139–152. <https://doi.org/10.33363/swjsa.v1i2.42>